

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Akuntabilitas publik adalah tugas pihak pemegang amanah (agent) untuk menjelaskan, menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan yang berhak dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.¹ Dengan menambahkan delegasi, hubungan keagenan didefinisikan sebagai kontak antara satu atau lebih (prinsipal) di mana orang lain (agen) terlibat untuk membuat keputusan kepada agen saat melaksanakan layanan tertentu.² Oleh karena itu, ada hubungan keagenan antara akuntabilitas dan manajemen pemerintah daerah di sektor publik. *Agent* adalah pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal sedangkan *principal* adalah pihak yang memberi imbalan kepada agen (teori keagenan yang merujuk pada *agent* adalah pemerintah dan *principal* merujuk pada masyarakat desa.).³

Di Indonesia, teori keagenan benar-benar digunakan dalam pemerintahan. Rakyat dan otoritas pemerintah, terutama kepala desa dan perangkat desa lainnya, adalah pihak utama dalam organisasi sektor publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan adanya keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dan teori keagenan.⁴ Tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan tidak hanya menyediakan pelaporan keuangan yang akurat dan jujur, tetapi juga menyediakan informasi keuangan untuk publik..⁵ Sebagai lembaga, pemerintahan daerah mengurangi

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*, 20-21.

² Faristina Rosalin, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*”, Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: 2011), 28.

³ Arifin, “*Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*”, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: 2005), 6.

⁴ Muhammad Ismail, dkk, “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19, No. 2, (2016). 328.

⁵ Muhammad Azlan, dkk, “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan*

risiko ketidakpercayaan pemangku kepentingan dalam kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola anggaran daerah sejauh ini.⁶

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktik pelaporan keuangan sektor publik adalah gagasan yang didasarkan pada teori keagenan. Dalam laporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen dalam pekerjaan pelaporan keuangan, menyediakan pengguna data keuangan pemerintah dengan informasi yang berarti. Masyarakat yang bertanggung jawab dan berperilaku sebagai *principal* membuat keputusan, baik secara sosial maupun politik. Interaksi antara lembaga pemerintah di bawah pemerintahan yang demokratis dapat dicirikan sebagai hubungan antara pemerintah dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berusaha bertindak sebagai agen, memenuhi tanggung jawab khusus yang dibebankan kepadanya oleh prinsipal yang menggunakan data keuangan pemerintah. Dalam kaitannya dengan instansi pemerintah, pemerintah harus bertindak sebagai agen untuk kepentingan pengguna informasi keuangan instansi tersebut.⁷

2. Keandalan Pelaporan Keuangan (Reliability Of Financial Statements)

Pelaporan keuangan adalah Struktur dan proses yang menentukan bagaimana data keuangan disajikan dan dilaporkan untuk memenuhi tujuan pelaporan yang mendukung tujuan ekonomi dan sosial suatu negara.⁸ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bagian dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP) paragraf 24 menyebutkan laporan keuangan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah yang relevan

Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Akuntansi Aktual 3, No. 2, (2015), 189.

⁶ Dian Hajra, Jamaluddin Majid dan Roby Aditiya, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo*”, ISAFIR “*Islamic Accounting and Finance Review*” 1, No. 2 (2020), 126-127.

⁷ Faristina Rosalin, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*”, Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: 2011), 29.

⁸ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi ketiga* BPF, (Yogyakarta: 2012).

dengan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi selama periode berjalan.

Keandalan pelaporan keuangan merupakan laporan keuangan yang sangat penting yang diciptakan oleh pemerintah karena merupakan unsur dari proses pengambilan keputusan pengguna terkait dengan informasi pelaporan keuangan. yang memberikan pandangan audit atas pelaporan keuangan pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.⁹ Berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa keandalan laporan keuangan adalah informasi yang memberikan keyakinan bahwa informasi itu benar atau valid. Artinya, tidak ada kesalahpahaman, dan tidak ada kesalahan serius, semua fakta dapat disajikan dan diverifikasi secara jujur. Jika informasi tidak dapat diandalkan saat menyajikan keputusan, pengguna informasi tidak mempercayai informasi yang disajikan. Laporan bermanfaat bagi pemakai karena keandalan laporan keuangan dapat diukur dari nilai, informasi laporan, dan kualitas keuangan serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Adapun informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur
Informasi ini secara akurat menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang ingin disajikan dengan jujur atau mungkin secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi
Dalam laporan keuangan, pengguna informasi dapat melihat informasi yang disajikan dan hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya tidak banyak berubah meskipun pengujian dilakukan berkali-kali oleh pihak yang berbeda.
- c. Netralitas
Informasi telah ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.¹⁰

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)

Pengembangan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dalam penyusunannya memerlukan penggunaan sumber daya

⁹ M. Sufi Irfan Al Idrus, *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan”*, Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2020).13-14.

¹⁰ Tantriani Sukmaningrum, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (Semarang : 2012), 24-25.

manusia yang memahami standar akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan yang berkualitas adalah yang telah menguasai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kualitas sumber daya manusia mengacu pada kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Penyajian laporan keuangan berdampak kepada seluruh pegawai yang belum memahami sepenuhnya tugas dan perannya, serta hambatan pengolahan data.¹¹

Cara untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ketika menjalankan fungsi yang berisi akuntansi jelas dari tingkat tanggungjawabnya dan kemampuan sumber daya tersebut. Tanggung jawabnya jelas dari deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dasar untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tanpa adanya deskripsi yang jelas, sumber daya tidak dapat dipenuhi dengan benar. Sementara itu, latar belakang pendidikan, pelatihan selanjutnya, dan kemampuan untuk mengimplementasikan tugas.¹² dapat dilihat. Kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melakukan fungsi atau hak istimewa untuk mencapai tujuan Anda secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kiriman (*output*) dan kemampuan untuk mengeksekusi dan menghasilkan kiriman (*output*).¹³

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang dijalankan oleh pemimpin untuk memberikan keyakinan yang memadai melalui keandalan pelaporan keuangan, efektifitas, efisiensi dan

¹¹ Annisa Maharani dan Henri Agustin, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari (Studi Empiris Pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, No. 1, (2021), 32-49.

¹² Rina Ratnasari, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Studi pada DPPKD, BAPPEDA dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)”, *Jurnal Akuntansi*, (2016). 4-5.

¹³ Faristina Rosalin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)”, *Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro*, (Semarang: 2011), 48.

kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku.¹⁴ Pengendalian intern menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah proses yang dijalankan oleh pemimpin untuk memberikan keyakinan memadai pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas, dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Menurut tujuannya, pengendalian intern dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang dilakukan secara menyeluruh di dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Pemerintah desa. Tujuan pengendalian intern diharapkan bahwa pengendalian intern dapat memberikan keyakinan mengenai keandalan pelaporan keuangan kepada segala pihak yang menggunakan. Juga diharapkan dapat menyakinkan dan efisiensi sehingga biaya yang dikeluarkan organisasi akan semakin kecil dan aktivitas organisasi berjalan dengan baik, sehingga tujuan dapat tercapai. Dan juga diharapkan memberikan keyakinan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁴ Yhuni Ikromatun Nisa, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa*”, *Jurnal Akuntansi*, (2021), 31.

¹⁵ Agoes Sukrisno, “*Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*”, Salemba Empat, (Jakarta: 2012), diakses pada tanggal 14 Juli 2022, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/20154/auditing-petunjuk-praktis-pemeriksaan-akuntan-oleh-akuntan-publik>

¹⁶ Sujatmiko Wibowo, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut PP No. 60 Tahun 2008*, Slide Share (26 November 2018), diakses pada tanggal 02 November 2021, <https://www.slideshare.net/MrSWibowo/sistem-pengendalian-intern-pemerintah-124097977>.

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Unsur-unsur pembentuk SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.¹⁷

5. Pengawasan Keuangan Daerah (PKD)

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar kinerja tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Tujuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selain itu pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah, dan sumber dayanya demi memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

¹⁷ Yhuni Ikromatun Nisa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa", *Jurnal Akuntansi*, (2021), 16.

pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).¹⁸

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. menggambarkan bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. hal ini pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIK), pengawasan oleh camat, Pengawasan oleh badan permusyawaratan desa, pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya.

Pengawasan keuangan di tingkat desa merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pembentukan pengawasan keuangan desa memungkinkan untuk memantau aktivitas perangkat desa dalam hal pelaporan anggaran keuangan, dalam penyusunannya dapat Meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan daerah agar pelaporan keuangan desa dapat dipercaya dan diandalkan.¹⁹ Menurut Fransiska, menyatakan bahwa pengawasan keuangan desa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah secara umum mencakup semua upaya untuk memastikan bahwa keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tata cara, dan undang-undang yang berlaku.²⁰

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan

¹⁸ Reski A malia Putri, “*Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Paomacang)*.” *Jurnal Akuntansi*, (2020), 6.

¹⁹ Eva Saras Sati, “*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)*”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, (2018), 19-21.

²⁰ Fransiska, “*Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu)*”, *JOM FEKOM 2*, No.2 (2015), 21.

merupakan cara untuk membangun sistem pengawasan yang efektif baik untuk pengawasan internal maupun eksternal adalah salah satu strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan legitimasi rakyat atas kinerja pemerintah. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya hanya bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan dapat membantu tercapainya tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan seefisien mungkin melalui pemantauan. Selain itu, Melalui pengawasan, muncul penyimpangan-penyimpangan dalam ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan, ruang lingkup pedoman pimpinan yang dilaksanakan, dan pelaksanaan pekerjaan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penetapan atau evaluasi ruang lingkup.

Adapun jenis-jenis pengawasan pemerintah adalah:

1. Pengawasan Intern, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam kerangka kerja masing-masing unit organisasi.
2. Pengawasan ekstern, merupakan pemeriksaan oleh unit pengawasan di luar unit organisasi.
3. Pengawasan preventif, merupakan pengawasan Kegiatan sebelum dilaksanakan. Sehingga bisa mencegah terjadinya penipuan.

²¹ Rizki Agus Putra, *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan. Keuangan Daerah, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)”*, JOM Fekon 4, No.1 (2017), 1039-1040.

4. Pengawasan represif, merupakan pengawasan kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan.²²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Reza Uswatun Hasanah, Diyah Probowulan, Gardina Aulin Nuha. (2019).	Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Melalui variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. ²³	Variabel Dependen : Keterandalan Pelaporan Keuangan pemerintah Desa. Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal.	Analisis Regresi Berganda	Kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan pemerintah desa.
2.	Yhuni	Analisis	Variabel	Analisis	Kualitas

²² Andry Trisaputra, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumrat)", Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, (Padang: 2013), 8.

²³ Rezza Uswatun Hasanah, dkk, "Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Melalui variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember", Jurnal Akuntansi, (Jember : 2019).

	Ikromatun Nisa. (2021).	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Pecangaan). ²⁴	Dependen : Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern.	Regresi Berganda	sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
3.	I Putu Daniarsa. (2021).	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan	Variabel Dependen : Keterandalan Pelaporan Keuangan pemerintah Desa. Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya	Analisis Regresi Berganda	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan desa.

²⁴ Yhuni Ikromatun Nisa, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa”, *Jurnal Akuntansi*, (2021).

		Pada LPD Se-Kecamatan Pupuan. ²⁵	Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal.		
4.	Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani. (2017).	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. ²⁶	Variabel Dependen : Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern.	Analisis Regresi Berganda	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.
5.	Della Sartika,	Pengaruh Kualitas	Variabel Dependen :	Regresi Linier	Kualitas sumber daya

²⁵ I Putu Daniarsa, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada LPD Se-Kecamatan Pupuan", Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan, (Edisi Januari 2021).

²⁶ Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan desa Di Kabupaten Klaten", Jurnal Akuntansi 5, No. 2 (2017).

	Rohmad Yuliantoro C.W. (2019).	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur. ²⁷	Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah desa. Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern.	Berganda	manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan informasi dan keuangan pemerintah desa.
6.	Lelly Rahayu, Dessy Putri Andini. (2021).	Pengaruh pengawasan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Sumber	Variabel Dependen : Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Variabel Independen :	Regresi Linier Berganda	Pengawasan keuangan, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

²⁷ Della Sartika dan Rohmad Yuliantoro C.W, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur", Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Ahmad Dahlan, (Jakarta: 2019).

		Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. ²⁸	Pengawasan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia.		daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Fransiska. (2015).	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Variabel Dependen : Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Independen : Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan	Analisis Regresi Berganda	Sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

²⁸ Lelly Rahayu, Dessy Putri Andini, “Pengaruh pengawasan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”, Jurnal Akuntansi Trapan Dan Bisnis 1, No. 2 (2021).

		Labuhan Batu. ²⁹	Tekhnologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi.		
--	--	-----------------------------	--	--	--

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reza Uswatun Hasanah, Diyah Probowulan, dan Gardina Aulin Nuha. Yang berjudul “Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Melalui Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern, serta kesamaan dalam tehnik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dan adanya perbedaan sampel peneliti terdahulu adalah 80 responden sedangkan penelitian ini 54 responden.
2. Yhuni Ikromatun Nisa. Yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Pecangaan).” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, juga kesamaan pengujian

²⁹ Fransiska, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu)”, JOM FEKOM 2, No.2 (2015).

menggunakan pengujian hipotesis, serta kesamaan tehnik analisa data adalah sama-sama menggunakan model analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kecamatan Pecangaan sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung. Dan adanya perbedaan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah Badan Permusyawaratan Desa sedangkan penelitian ini adalah Perangkat Desa. juga perbedaan tehnik pengambilan data pada peneliti terdahulu menggunakan Random Sampling sedangkan penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling. Serta Perbedaan peneliti terdahulu menggunakan variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

3. I Putu Daniarsa. Yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada LPD Se-Kecamatan Pupuan.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kecamatan Pupuan sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung. Dan adanya perbedaan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah LPD sedangkan penelitian ini adalah Perangkat Desa. Serta Perbedaan peneliti terdahulu menggunakan variabel independen manfaat teknologi informasi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.
4. Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani. Yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, dan Sistem Pengendalian Intern. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di SKPD Kabupaten

Klaten sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. dan Perbedaan peneliti terdahulu menggunakan variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

5. Della Sartika, Rohmad Yuliantoro C.W. Yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, juga kesamaan teknik analisa data sama-sama menggunakan model analisis regresi linier berganda, serta pengambilan sampel sama-sama menggunakan purposive sampling. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kabupaten Belitung Timur sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung.
6. Lelly Rahayu, Dessy Putri Andini. Yang berjudul “Pengaruh pengawasan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah pengawasan keuangan juga kesamaan teknik analisa data sama-sama menggunakan model analisis regresi linier berganda, serta pengambilan sampel sama-sama menggunakan purposive sampling, dan teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kabupaten Jember sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung. adanya perbedaan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah SKPD sedangkan penelitian ini adalah Perangkat Desa.
7. Fransiska. Yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu.” Memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan

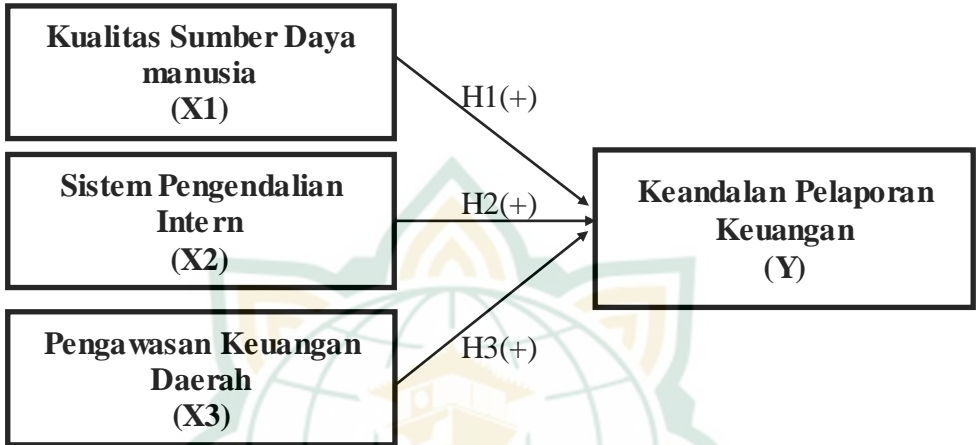
penelitian ini, yaitu: kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, dan kesamaan variabel independen yang digunakan adalah pengawasan keuangan daerah, dan sumber daya manusia, juga kesamaan teknik analisa data sama-sama menggunakan model analisis regresi linier berganda, serta pengambilan sampel sama-sama menggunakan purposive sampling, dan teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: adanya perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kedung. adanya perbedaan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah SKPD sedangkan penelitian ini adalah Perangkat Desa.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan diperkuat dengan hasil peneliti terdahulu tentang keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, maka kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak.³⁰ Adapun Kerangka berpikir dalam penelitian ini berkisar pada apa yang mempengaruhinya, keandalan laporan keuangan pemerintah desa kecamatan kedung. Sedangkan Satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah variabel dependennya adalah keandalan pelaporan keuangan (Y), dan variabel independennya yaitu: (X1) kualitas sumber daya manusia, (X2) sistem pengendalian intern, dan (X3) pengawasan keuangan daerah. Hipotesis yang dirumuskan mengacu pada kerangka berpikir yang dituangkan dalam model pada penelitian ini ditujukan gambar berikut

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta (Bandung: 2016), 60.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Afrianti, kualitas bakat adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu melalui penyediaan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai. Perangkat desa harus memiliki kemampuan yang sangat baik yang ditunjang dengan latar belakang pendidikan, pelatihan akuntansi, dan pengalaman akuntansi agar dapat memberikan pengelolaan keuangan/desa yang baik. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini dapat memahami logika akuntansi dengan baik selama penerapan sistem akuntansi.³¹

Sumber daya manusia memiliki pengalaman menerapkan sistem akuntansi dan mungkin menjadi penghambat jika mereka tidak memahami bagaimana ilmu akuntansi diterapkan. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kualitas pelaporan keuangan, pihak prinsipal (masyarakat) dapat mempercayai keputusan mereka, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dalam meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan menjadi

³¹ Dita Arfianti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)", Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: 2011), 25-26.

andal. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan akuntansi yang tepat.³²

Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu oleh Dewi Kusuma Wardani, dan menunjukkan adanya pengaruh positif kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Karmila, Tanjung dkk. dan Susanti, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia bukan merupakan faktor yang memengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah atau tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuat hipotesis berikut ini.

H1: Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Kedung.

2. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian internal adalah metode mengelola, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta sangat penting untuk menghindari dan mengidentifikasi pengelapan. Ini terdiri dari kebijakan dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan, memastikan atau memberikan informasi data keuangan yang akurat dan andal, serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Implementasi pengendalian internal yang tepat memberikan jaminan yang wajar untuk laporan keuangan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.³³ Sistem pengendalian internal mencakup berbagai instrumen manajemen untuk mencapai berbagai tujuan, tujuan tersebut untuk menjamin pelaporan keuangan dan statistik, serta menjadikan kegiatan pemerintahan desa lebih andal, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, dalam penyusunan pemerintah desa, Pengendalian internal adalah dasar dari tata kelola perusahaan yang baik dan garis pertahanan pertama

³² Eva Saras Sati, "*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)*", Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, (2018), 25.

³³ Tantriani Sukmaningrum, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*", Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (Semarang : 2012), 38.

terhadap data dan informasi yang tidak valid. Evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu faktor untuk memberikan penilaian atas pelaporan keuangan (SPI). Pengendalian intern dalam pemerintah pusat maupun pemerintah desa dirancang dan diarahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).³⁴

Hal ini berdasarkan dari penelitian terdahulu oleh Dewi Kusuma Wardani, menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh I Putu Daniarsa, membuktikan dalam penelitiannya sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuat hipotesis berikut ini.

H2: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Kedung.

3. Pengawasan Keuangan Daerah (PKD)

Pengawasan diperlukan untuk Menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang mekanisme umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan, dan mengamankan sumber data organisasi dan pemerintah semuanya memerlukan pengawasan. Ini adalah upaya sistematis untuk mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Data digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.³⁵ Kurangnya pengawasan menyebabkan kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan daerah, yang mengakibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan yang tidak memadai, serta kurangnya komitmen terhadap kapasitas, kegiatan identifikasi risiko yang kurang optimal, pengelolaan fisik aset yang lemah dan

³⁴ Tantriani Sukmaningrum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)", Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (Semarang : 2012), 38.

³⁵ Inayati, Siti Reuni, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur)", Jurnal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani 6, No. 1 (2018), 184.

pengelolaan arsip yang dibawa. Dari sebuah transaksi. Itu tidak terlalu akurat dan tidak tepat waktu.³⁶

Pengawasan keuangan di tingkat daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah dapat mengontrol kegiatan pegawai-pegawai Perangkat Desa Saat menggunakan anggaran dan pelaporan keuangan dalam penyusunan pelaporan keuangan dapat Meminimalkan kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan daerah sehingga pelaporan keuangan daerah lebih dapat dipercaya dan diandalkan.³⁷ Oleh karena itu, pengaruh antara keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik pengawasan keuangan daerah maka dalam keandalan laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai.

Pernyataan ini juga berdasarkan penelitian terdahulu oleh Lelly Rahayu, yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah Berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Fransiska, yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuat hipotesis berikut ini.

H3: Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Kedung.

³⁶ Andry Trisaputra, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”, Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi, (Padang: 2013), 10.

³⁷ Eva Saras Sati, “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, (2018), 19-21.